



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI
KOMP. PERKANTORAN BUKIT TENGAH – SIULAK 37162



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Komplek Perkantoran Bukit Tengah - SIULAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025 - 2029

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029;
 - b. Bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029.
- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

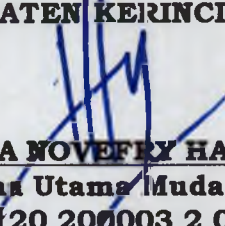
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045 (Lembaga Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1);

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 - 2029.
- KESATU :** Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA :** Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2025 - 2029 merupakan landasan bagi unit kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
- KETIGA :** Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2025 - 2029 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Siulak
Pada Tanggal : 1 Desember 2025
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI**



Ir.MAYA NOVEFY HANDAYANI, ST
Pembina Utama Muda
19741120 200003 2 006

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia NYA penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 setelah melalui proses penyusunan yang melelahkan, akhirnya dapat diselesaikan.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2025-2029 ini disusun selain sebagai acuan bagi penyusunan usulan program/kegiatan tahunan selama kurun waktu 2025-2029 guna mendukung tujuan dan sasaran program kegiatan sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Saran, kritik, dan masukan lain yang membangun sangat diharapkan untuk keperluan demi penyempurnaan dokumen serupa di waktu mendatang.

Siulak, November 2025

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI**

MAYA NOVEFRY HANDAYANI, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19741120200003 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	6
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	9
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	18
2.2.1 Permasalahan Pelayanan.....	18
2.2.2 Isu-Isu Strategis	21
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	22
3.1. Tujuan	23
3.2. Sasaran	24
3.3. Strategi	25
3.4. Arah Kebijakan	26
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	31
4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	46
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	58
PENUTUP	64
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Aparatur Sipil Negara Dinas PUPR Kab. Kerinci Tahun 2024 menurut golongan	9
Tabel 2.2.	Aparatur Sipil Negera Dinas PUPR Kab. Kerinci Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan	10
Tabel 2.3.	Inventaris Sarana dan Prasarana Dinas PUPR Kabupaten Kerinci Tahun 2024.....	10
Tabel 2.4.	Pengukuran Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Kab. Kerinci Tahun 2020-2024	13
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci	14
Tabel 2.6.	Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024	15
Tabel 2.7.	Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024	17
Tabel 2.8.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PUPR Kabupaten Kerinci	19
Tabel 2.9.	Perumusan Isu Strategis Dinas PUPR Kab. Kerinci	21
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	22
Tabel 3.2.	Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas PUPR Th.2025-2029 ..	24
Tabel 3.3.	Penahapan Renstra Dinas PUPR Kab. Kerinci Th,2025-2029 ..	26
Tabel 3.4.	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PUPR Kab. Kerinci	28
Tabel 3.5.	Perumusan Arah Kebijakan	29
Tabel 4.1.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan	32
Tabel 4.2.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas PUPR Kabupaten kerinci Tahun 2025-2029 (Lampiran)	67
Tabel 4.3.	Daftar Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Pembangunan Daerah	57
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUPR Kabupaten kerinci Tahun 2025-2029.....	58
Tabel 4.5.	Metadata Sasaran Kinerja Dinas PUPR Kab. Kerinci tahun 2025 – 2029	59
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PUPR Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029	61
Tabel 4.7.	Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kerinci	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 dibidang urusan Pekerjaan Umum. Dokumen Renstra ini memuat visi, misi serta arah pembangunan infrastruktur untuk jangka waktu lima tahun kedepan dan menjadi pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini mengacu pada arah dan kebijaksanaan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 dan mempedomani Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Jambi. Hal ini dilakukan agar dapat terwujudnya sinkronisasi kebijaksanaan terkait dengan urusan Pekerjaan Umum.

Mengingat adanya pergantian Kepala Daerah atau lebih tepatnya Bupati baru maka penyusunan Rencana Strategis untuk setiap Perangkat Daerah harus berpedoman pada visi dan misi Bupati terpilih serta diselaraskan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Oleh karena itu penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci ini merupakan penjabaran visi, misi, kebijakan dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci dalam masa 5 tahun serta memperhatikan potensi dan isu strategis bidang infrastruktur yang berkembang.



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci 2025 – 2029 disusun berdasarkan perangkat Regulasi sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029;



1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci disusun dengan maksud :

1. Menyediakan dokumen rencana sebagai acuan resmi bagi pemerintah daerah, DPRD dan Masyarakat dalam menentukan prioritas program pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam waktu lima tahun perencanaan (2025-2029).
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD, serta masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program Kepala Daerah 5 lima tahun kedepan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun (2025-2029) adalah sebagai :

1. Dokumen rencana induk pembangunan infrastruktur wilayah Kabupaten Kerinci yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci;
2. Arah Pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa Bakhti Kepala Daerah terpilih;
3. Salah satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
4. Sarana untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Sarana untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program operasional tahunan; dan
6. Upaya untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah melalui pembangunan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun (2025-2029) adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan Struktur PD, Sumber daya PD, Kinerja Pelayanan PD, Kelompok Sasaran Layanan beserta Mitra PD, Dukungan BUMD, Kerjasama Daerah serta Permasalahan pelayanan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.

Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD provinsi/kabupaten/kota Tahun 2025-2029 serta strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029

Bab IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Menyajikan uraian program, kegiatan, subkegiatan lengkap dengan kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Termasuk uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan serta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)



Bab V :PENUTUP

Menjelaskan Kesimpulan dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci secara substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor : 2 Tahun 2023 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci adalah sebagai berikut :

1). Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2). Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- d. Pelaksanaan Administrasi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Kerinci sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3). Susunan Organisasi

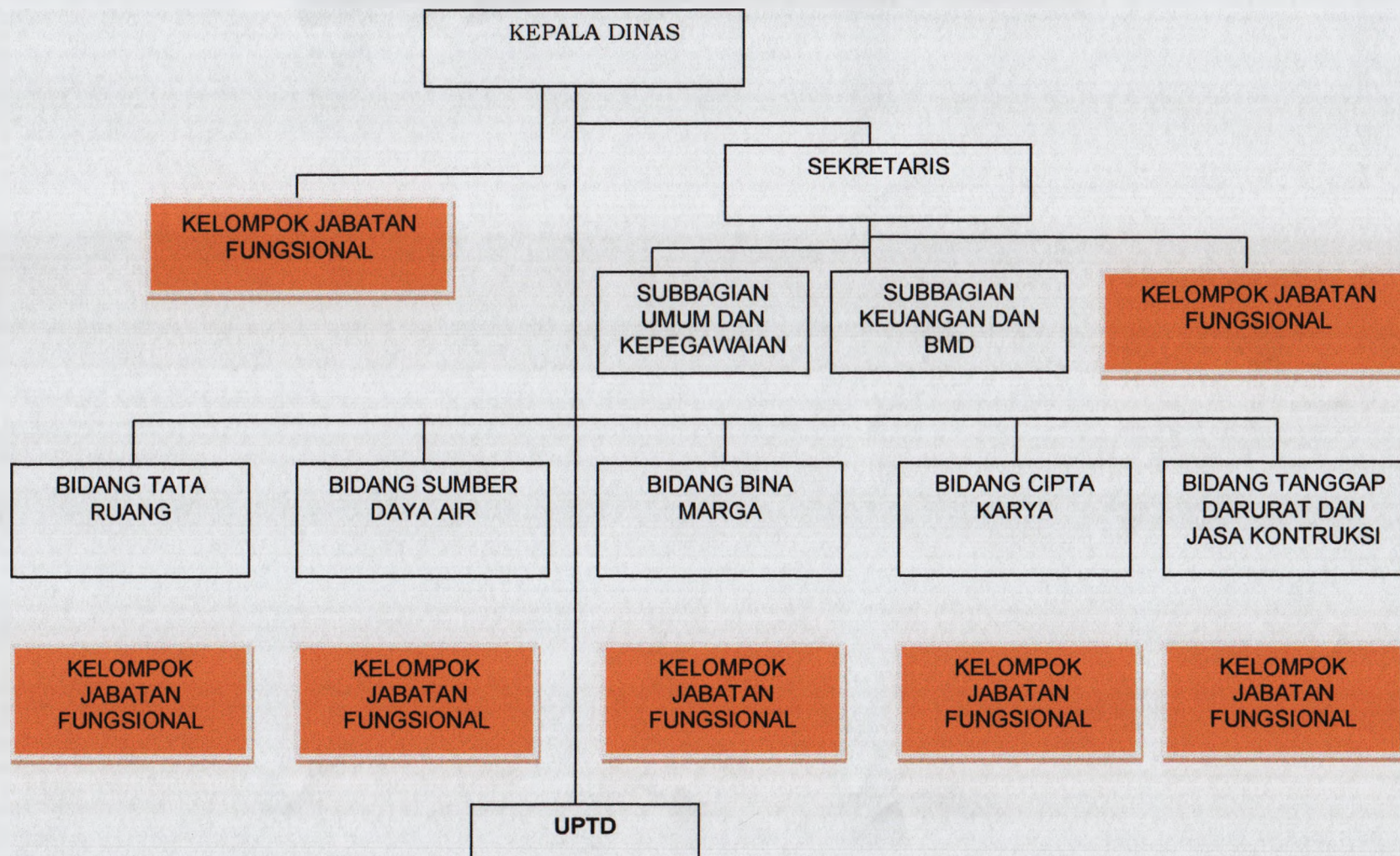
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Cipta Karya
 - Kelompok jabatan Fungsional
- d. Bidang Sumber Daya Air
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Bina Marga
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Tata Ruang
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Bidang Bina Jasa Kontruksi dan Tanggap Darurat.
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- h. UPTD Perbengkelan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut :



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PUPR KABUPATEN KERINCI





2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1). Pegawai

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Desember 2024 sebanyak 338 Orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 7 orang dan Non PNS/Pegawai Tidak Tetap sebanyak 268 orang. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2024.

Menurut golongan dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1

Aparatur Sipil Negara Dinas PUPR Tahun 2024

Menurut Golongan

Golongan	Eselon					Non Eselon		Jumlah
	I	II	III	IV	V	Fungsional	Staf	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/b	-	1	1	-	-	-	-	2
Golongan IV/a	-	-	4	-	-	3	3	10
Jumlah Golongan IV								12
Golongan III/d	-	-	-	3	-	7	9	19
Golongan III/ c	-	-	-	-	-	4	11	15
Golongan III/b	-	-	-	-	-	1	7	8
Golongan III/a	-	-	-	-	-	-	8	8
Jumlah Golongan III								50
Golongan II/d	-	-	-	-	-	-	4	4
Golongan II/c	-	-	-	-	-	-	4	4
Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Golongan II								8
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Golongan I								0
Jumlah Pegawai								70

Sumber : Data olahan Bag, Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab.Kerinci (2024)

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci didominasi oleh golongan III sebanyak 50 orang, diikuti oleh Golongan IV sebanyak 12 orang, dan golongan II sebanyak 8 orang. Secara rinci jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada **Tabel 2.2 berikut :**



Tabel 2.2

Aparatur Sipil Negara Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci
berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Doktoral	0
2.	Pasca Sarjana	15
3.	Sarjana	37
4.	Sarjana Muda/D3	8
5.	SLTA	10

2). Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci berupa Gedung Kantor, Mushalla, Kantor UPTD, Peralatan Perbengkelan, alat Berat, Kendaraan Operasional, alat komunikasi, peralatan computer dan lain sebagainya. Adapun sarana dan prasarana tersebut menurut hasil pendataan aset dinas tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Inventaris Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2024

Jenis Inventaris	Jumlah
Gedung Kantor	1 Unit
Kantor UPTD	1 Unit
Mushalla	2 unit
Grader	2 unit
Buldozer	1 unit
Excavator	4 unit
Dump Truck	2 unit
Asphalt Mixing Plant	4 unit
Asphalt Finisher	1 unit
Asphalt Tanker	1 unit
Asphalt Slayer	1 unit
Tandem Roller	1 unit
Stamper	10 unit
Stone Crusher	2 unit
Wheel Loader	2 unit
Loader	2 unit
VIB Roller Single Drumb	3 unit
Road Roller Double Drumb	1 unit
Air Compressor	1 unit
Transportabel Compressor	1 unit
Pompa	2 unit



Jenis Inventaris	Jumlah
Mini Bus	1 unit
Truck	2 unit
Pick Up	1 unit
Mobil Tanki	1 unit
Sepeda Motor	24 unit
Kendaraan Bermotor Roda Tiga	4 unit
Gerobak Dorong	2 unit
Roll Meter	1 unit
GPS	30 unit
Thermometer Standart	1 unit
Chain Saw	4 unit
Lemari Besi	14 unit
Rak Besi	5 unit
Filling Besi	76 unit
Lemari Kayu	5 unit
Alat Penghancur Kertas	6 unit
Mesin Absensi	1 unit
Meja Rapat	27 unit
Kursi Tamu	2 unit
Mesin Potong Rumput	37 unit
Camera Video	3 unit
Camera Digital	32 unit
Handy Cam	2 unit
AlatPembantuPemadamKebakaran	28 unit
PC Unit	41 unit
Laptop	49 unit
Note Book	14 unit
Desktop	9 unit
Meja Kerja	12 unit
Kursi Kerja	12 unit
Lemari Arsip	23 unit
Proyektor	10 unit
UPS	19 unit
Theodolit	1 unit
Hendy Talky	4 unit
Infra Red	1 unit
Water Meter	1 unit
Drill Machine	1 unit
Concrate Hammer Test	2 unit
Extraction Filter	3 unit
Agregate	2 unit
Compressor unit	1 unit
Stabilizer	1 unit
Tanki Meter	1 unit
Burner batu bara	1 unit
Generator	2 unit
Diamond Saw	5 unit



2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci sangat terkait dengan indikator-indikator kinerja dan variabelnya. Dalam hal ini indikator yang dimaksud meliputi :

- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainny a	Target Renstra PD tahun 2020-2024					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik		Tingkat kemantapan jalan kabupaten			39,79	42,79	45,79	48,79		39,79	40,43	38,77	37,60	
2	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk					0,37	0,40	0,43	0,46		0,37	0,37	0,37	0,37	
3	Persentase pembangunan turap diwilayah penghubung dan aliran sungai rawan longsor					28,41	31,41	34,41	37,41		28,41	28,41	35,22	38,67	
4	Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik					31,39	34,39	37,39	40,39		31,39	50,15	59,76	59,76	
5	Rasio Jaringan Irigasi		Rasio luas daerah irigasi			0,29	0,59	0,89	1,19		28,26	28,26	28,26	28,26	
6	Persentase Penduduk berakses air minum	100%	Persentase Rumah Tangga berakses air minum			13,42	15,42	17,42	19,42		13,42	13,86	54,90	53,52	



7	Persentase areal kawasan kumuh		Persentase kawasan permukiman kumulatif dibawah 10 Ha			3,93	3,63	3,33	3,03		3,93	3,93	3,93	3,93	
---	--------------------------------	--	---	--	--	------	------	------	------	--	------	------	------	------	--

Adapun untuk pengukuran pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2024 bisa terlihat pada **tabel 2.4.** diatas

Sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, bisa dilihat pada **tabel 2.5.** dibawah ini:

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI**



Tabel 2.5.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci

Uraian***)	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada tahun Ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-Rata	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air		18.030.133.680	8.565.964.673	13.487.722.560	9.058.208.241		17.390.565.001	8.520.795.447	13.475.562.447	9.024.127.442		96,45	99,47	99,91	99,62		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		6.123.024.800	4.421.787.400	840.202.700	496.196.700		5.886.696.596	4.233.706.278	812.085.448	486.194.055		96,14	95,74	96,65	97,98		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		2.260.170.800	2.555.727.000	51.769.100	-		2.224.764.899	2.523.612.242	42.223.224			98,43	98,74	81,56			
Program Pengembangan system dan Pengolahan Persampahan Regional			-	-	9.184.400				-	9.184.400				-	100		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase		1.199.115.667	922.295.355	1.378.727.442	1.777.508.472		1.199.115.667	872.560.920	1.369.695.282	1.777.073.108		100	94,60	99,34	99,98		
Program Penataan Bangunan Gedung		37.600.440.575	42.972.530.610	34.528.747.788	13.164.858.779		35.471.116.776	40.942.652.325	34.340.265.235	13.150.169.855		94,34	95,27	99,45	99,89		
Program Penataan Gedung dan Lingkungannya		10.570.587.355	13.025.319.118	31.045.358.656	32.580.001.887,5		10.535.436.812	12.968.096.640	31.022.194.077	32.568.955.956		99,67	99,56	99,93	99,97		
Program Penyelenggaraan Jalan		53.156.095.233	46.075.381.101	51.763.461.814	53.957.183.580		51.852.982.640	44.689.815.853	51.343.905.589	53.248.143.506		97,55	96,99	99,19	98,68		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI**



Uraian***)	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada tahun Ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengembangan Jasa Konstruksi		473.317.715	596.480.800	497.956.300	452.258.650		448.341.270	568.380.590	494.573.700	439.294.450		94,72	95,28	99,32	97,13		
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		2.258.884.204	1.379.374.060	2.490.011.625	868.010.900		2.110.503.734	1.116.943.854	2.317.533.620	738.459.247		93,43	80,97	93,07	83,16		
Program Pengembangan Perumahan		37.909.900	25.178.400	-	-		37.909.900	25.178.400				100	100				
Program Kawasan Permukiman		713.442.300	1.171.623.200	-	266.555.300		689.928.213	1.138.398.300		264.447.100		96,70	97,16		99,21		
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				-	-												
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU)		481.673.300	524.797.480	854.414.300	-		460.248.200	512.357.680	777.039.540			95,55	97,16	90,94			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1.602.216.655	9.279.665.125	10.686.616.059	10.785.859.488		1.554.269.145	8.965.276.476	10.248.831.652	9.939.699.514		97,01	96,61	95,90	92,15		

Pada tabel diatas, terlihat bahwa dari 15 (lima belas) program yang ditawarkan pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 terdapat 1 (satu) program yang tidak berjalan sama sekali yaitu **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**. Semoga hal tersebut hendaknya menjadi perhatian khusus bagi bidang yang menanganin



Sementara itu realisasi capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024 di Kabupaten Kerinci bisa terlihat ditabel bawah ini

Tabel 2.6.
Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Indikator nerja/ Teknis Layanan SPM	Satua n	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapai an	Aksi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		BELUM TUNTAS			56,67%	
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari- hari					100,00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80,00%	
			Jumlah Total Yang harus dilayani	Jumlah Total Yang terlayani	Yang harus terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	orang	2132	2132	0	100,00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20,00%	
			Jumlah Mutu Yang harus dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang terlayani/Dipenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100,00%	
	JARINGAN PERPIPAAN						
1	Ukuran kuantitas air minum, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	533	533	0	100,00%	
2.	Ukuran kualitas air minum, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau	Rumah Tangga	533	533	0	100,00%	



2.	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestic					13,33%	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					(80%)	0,00%	
			Jumlah Total Yang harus dilayani	Jumlah Total Yang terlayani	Yang harus terlayani		
A.	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	orang	0	0	0	0,00%	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					(20%)	13,33%	
			Jumlah Mutu Yang harus dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang terlayani/Dipenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/Terpenuhi		
B.	JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					66,67%	
1.	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestic, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengelolaan air limbah domestik	Rumah Tangga	0	0	0	0,00%	

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Berdasarkan tabel 2.6 diatas terlihat bahwa capaian SPM bidang pekerjaan umum pada Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari tahun 2024 mencapai **100%** (seratus persen). Capaian tersebut terdiri dari:

- Persentase Pencapaian penerima Layanan Dasar sebesar **80,00%**; dan
- Persentase Pencapaian mutu layanan dasar sebesar **20,00%**.

Selanjutnya pada pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, capaiannya sebesar **13,33%** (tiga belas koma tiga puluh tiga persen) dengan rincian sebagai berikut:

- Persentase Pencapaian penerima Layanan Dasar sebesar **0,00%**; dan
- Persentase Pencapaian mutu layanan dasar sebesar **13,33%**.

Berdasarkan hasil capaian dari kedua jenis layanan dasar diatas, maka didapatkanlah hasil bahwa indeks capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2024 adalah **56,67%** atau kategori **BELUM TUNTAS**.



Pelaksanaan pemenuhan SPM pada bidang Perumahan Rakyat tahun 2024 masih belum ada kegiatan. Hal ini disebabkan karena tidak terjadi bencana alam ataupun belum adanya program-program dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berdampak terjadinya relokasi.

Tabel 2.7
Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja/Teknis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		BELUM TUNTAS			7,69%	
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				(100%)	7,69%	
Tidak Terjadi Bencana							
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota				(100%)	7,69%	
Tidak ada Relokasi Program Pemerintah							

Pada tabel diatas, dapat kita lihat bahwa total indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2024 adalah **7,69%** atau dikategorikan **BELUM TUNTAS**.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci adalah **Masyarakat dalam kabupaten Kerinci** dalam urusan Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan yang mencakup pelayanan Jalan dan jembatan, irigasi, drainase, rumah tinggal layak huni dan berakses air bersih dan sanitasi, pembangunan turap, Gedung pemerintahan, TPA dan Tanah untuk Kepentingan umum.



Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci menjalin koordinasi dan mendapat dukungan dari BUMD seperti **PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci** dalam penanganan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM).

Dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, Dinas PUPR Kabupaten Kerinci tentu saja tidak melakukannya sendiri, karena masih Mitra Perangkat Daerah lainnya seperti **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kerinci, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci serta Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kerinci.**

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu faktor signifikan dalam keberhasilan pemabangunan karena ini berkaitan langsung dengan rakyat banyak. Selain itu pembangunan infrastruktur bisa membantu pertumbuhan ekonomi serta bisa mengurangi potensi bencana alam.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci bisa terlihat pada **Tabel 2.8.** berikut ini:



Tabel 2.8.
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kualitas layanan infrastruktur	1. Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	a. Jaringan Irigasi belum sepenuhnya menjangkau areal pertanian beririgasi b. Masih kurangnya jumlah tembok penahan tebing sehingga rawan terjadi longsor dan banjir
		2. Belum optimalnya Penyelenggaraan Jalan	Perkembangan kondisi jalan yang rusak ringan dan rusak berat semakin tinggi
		3. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik	a. Belum tercapainya layanan sanitasi air limbah domestik 100% b. Belum adanya data akurat jumlah rumah tangga yang mempunyai akses sanitasi layak



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		4. Belum optimalnya pengembangan sistem pengelolaan persampahan TPA,TPST,SPA,TPS3R,TPS	a. Sarana dan prasarana yang belum memadai b. Belum adanya TPA yang bisa mengolah sampah
		5. Belum optimalnya penyelenggaraan Tata Ruang	belum optimalnya penegakan sangsi terhadap pelanggar tata ruang
		6. belum optimalnya pengembangan jasa kondruksi	Belum optimalnya ketersediaan jasa konstruksi khususnya jabatan operator, teknisi dan analis

Urusan: Perumahan Rakyat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kualitas layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Belum optimalnya Pengembangan Perumahan	a. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni b. belum optimalnya pelaksanaan SPM di bidang Perumahan Rakyat

Urusan : Pertanian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pengadaan dan pembebasan lahan/tanah	Masih minimnya pemahanan Perangkat Daerah dalam hal pertanian	Belum adanya SDM yang kompeten



2.2.2. Isu-Isu Strategis

Dalam merumuskan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kabupaten Kerinci didapat melalui 3 (tiga) aspek, yaitu: 1). Permasalahan, 2). Isu Startegis sesuai Lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional), 3). Portensi Daerah menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan. Rumusan Isu strategis Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.9.
Perumusan Isu Strategis Dinas PUPR Kabupaten Kerinci**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Sistem Drainase	Penurunan Kualitas Air	- SDGs - Krisis iklim dan pembangunan rendah karbon	Perubahan Iklim	Degradasi Lingkungan	Pencegahan Banjir dan Longsor
	Belum optimalnya Pengelolaan SPAM	Penurunan Kualitas Air	- SDGs - Krisis iklim dan pembangunan rendah karbon	Perubahan Iklim	Degradasi Lingkungan	Peningkatan Kualitas Air Bersih
	Belum optimalnya penyelenggaraan Tata Ruang	Alih Fungsi Lahan/ Lahan Kritis	- SDGs - Layanan Infrastruktur	Tumpang tindih kebijakan	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Penyesuaian Penataan Ruang
	Persentase kerusakan jalan masih tinggi		Keselamatan Jalan	Kesenjangan Kondisi Jalan	Polusi udara	Peningkatan Kemantapan Jalan Kabupaten

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Isu Startegis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 adalah:

1. Pencegahan Banjir dan Longsor
2. Peningkatan Kaulitas Air Bersih
3. Belum optimalnya penyelenggaraan Tata Ruang
4. Persentase Kerusakan Jalan Masih Tinggi



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa Penyusunan RPJMD Provinsi/Kabupaten /Kota Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/ simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD/Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

Oleh karena itulah dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2025-2029 ini, sulit ditampilkan Tujuan dan Sasaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang terbaru karena kondisi mereka dalam tahap penyusunan dokumen Renstra PD.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.
**Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun
2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026
Menyelenggarakan kualitas pelayanan prasarana jalan provinsi	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap	79,60 %	83,23%	85,32 %	87,83 %	90,02 %
Mewujudkan kualitas sumber daya air yang fungsional dan berkelanjutan	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	39,38%	49,6%	63,45%	75,48%	87,52%
		Persentase luas baku daerah irigasi yang terairi	81,04%	86,01%	90,16%	94,90%	98,22%



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Penurunan lingkungan kumuh	Persentase penurunan jumlah kawasan permukiman kumuh.	185 Ha	172 Ha	160 Ha	148 Ha	136 Ha
Terselenggaranya Penataan bangunan gedung	Meningkatnya penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase pembangunan bangunan dan gedung strategis provinsi	-	25 %	37,50%	37,50%	37,50%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung akses universal akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan tahapan air minum layak, perkotaan dan perdesaan	78,06%	79,08%	83,92%	85%	87%
Pengembangan jasa konstruksi	Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi	Rasio Tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli.	40 %	47%	54%	61%	68%

3.1. Tujuan

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029 yaitu dengan **VISI: “MEWUJUDKAN KERINCI YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA”** dan **MISI ke 4 : “Meningkatkan Infrastruktur Kewilayahan dan Ketahanan Bencana dan Ekologi”** serta untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci tahun 2025-2029 adalah:



“Meningkatkan kapasitas infrastuktur wilayah dan terpenuhinya kesesuaian Pemanfaatan Ruang ”

3.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan yaitu berupa hasil Pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Dalam mewujudkan Tujuan, maka ditetapkan sasaran yang harus dipenuhi yaitu :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur
2. Meningkatnya kualitas penataan ruang

Tabel 3.2

Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas PUPR Tahun 2025-2029

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah dan terpenuhinya kesesuaian pemanfaatan ruang	1.meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks infrastruktur	67,75	70,18	72,60	74,89	77,42	80	81,69	
		2.Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	97,70	97,80	98	98,09	98,19	98,28	98,39	



3.3. Strategi

Strategi Renstra Dinas PUPR Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra.

Strategi juga merupakan langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kerinci. Adapun strategi untuk sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

- a. Meningkatkan Kualitas Jalan wewenang Kabupaten Melalui Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan
- b. Meningkatkan Pendayagunaan dan pengelolaan SDA melalui Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SDA
- c. Meningkatkan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah.
- d. Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana akses air minum
- e. Meningkatkan Penataan Ruang Wilayah melalui penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), Penertiban dan Pngawasan terhadap penegakan hukum yang terkait Tata Ruang.
- f. Meningkatkan Pembangunan rumah untuk layak huni bagi Masyarakat yang bermukim dikawasan Kumuh, Masyarakat pedesaan kategori miskin, Masyarakat korban bencana dan korban relokasi program pemerintah/daerah.



Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 serta dokumen Rencana Strategis Dinas PUPR Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 yang memerlukan jangka 5 (lima) tahun proses atau penahapan. Dalam penahapan Pembangunan ada prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra yang dimaksud diatas, berdasarkan pada indikator sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.
Penahapan Renstra Dinas PUPR Kab. Kerinci
Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat Kemantapan Jalan mencapai 51,20% Irigasi dalam kondisi baik mencapai 71,29% Rasio Jaringan Irigasi mencapai 5,46% Persentase Sanitasi Layak sekitar 82,23% Persentase Akses Air Bersih sekitar 96,17% Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang mencapai 98% Persentase Rumah Layak Huni sekitar 78%	Tingkat Kemantapan Jalan mencapai 52,72% Irigasi dalam kondisi baik mencapai 78,79% Rasio Jaringan Irigasi mencapai 6,75% Persentase Sanitasi Layak sekitar 86,19% Persentase Akses Air Bersih sekitar 100,34% Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang mencapai 98,09% Persentase Rumah Layak Huni sekitar 79%	Tingkat Kemantapan Jalan mencapai 54,29% Irigasi dalam kondisi baik mencapai 87,08% Rasio Jaringan Irigasi mencapai 8,33% Persentase Sanitasi Layak sekitar 90,35% Persentase Akses Air Bersih sekitar 104,68% Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang mencapai 98,19% Persentase Rumah Layak Huni sekitar 80%	Tingkat Kemantapan Jalan mencapai 55,91% Irigasi dalam kondisi baik mencapai 96,24% Rasio Jaringan Irigasi mencapai 10,29% Persentase Sanitasi Layak sekitar 94,71% Persentase Akses Air Bersih sekitar 109,22% Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang mencapai 98,29% Persentase Rumah Layak Huni sekitar 81%	Tingkat Kemantapan Jalan mencapai 57,71% Irigasi dalam kondisi baik mencapai 105,40% Rasio Jaringan Irigasi mencapai 12,25% Persentase Sanitasi Layak sekitar 99,07% Persentase Akses Air Bersih sekitar 113,76% Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang mencapai 98,39% Persentase Rumah Layak Huni sekitar 82%

3.4. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan untuk mewujudkan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci diantaranya adalah :



- a. Peningkatan konektivitas dengan memperbanyak penanganan jalan yang kategori rusak dan rusak berat serta merevisi SK
Bupati tentang Jalan Wewenang Kabupaten karena ada beberapa jalan Kabupaten yang sudah menjadi wewenang provinsi dan negara.
- b. Peningkatan dan pengelolaan Sumber daya air dengan prioritas pada peningkatan kapasitas/ daya tampung bangunan air dan penyediaan air irigasi
- c. Pembangunan dan Penyediaan SPALD setempat
- d. Penyediaan dan Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di lokasi daerah pedesaan terpencil dan daerah yang belum punya akses PDAM
- e. Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman kumuh melalui peremajaan dan Pembangunan termasuk penyediaan PSU, Pembangunan Rumah untuk korban Bencana dan korban Relokasi program pemerintah Daerah serta Bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah
- f. Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang dengan prioritas pada Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

Untuk memperjelas keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan bisa dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.4
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PUPR Kab. Kerinci

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah dan terpenuhinya kesesuaian pemanfaatan ruang	1.meningkatnya kualitas infrastruktur	Meningkatkan KualitasJalan dan Jembatan wewenang Kabupaten Melalui Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Peningkatan konektivitas dengan memperbanyak penangunan jalan dan jembatan yang kategori rusak dan rusak berat serta merevisi SK Bupati tentang Jalan Wewenang Kabupaten karena ada beberapa jalan Kabupaten yang sudah menjadi wewenang provinsi
		Meningkatkan Pendayagunaan dan pengelolaan SDA melalui Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SDA	Peningkatan dan pengelolaan Sumber daya air dengan prioritas pada peningkatan kapasitas/ daya tampung bangunan air dan penyediaan air irigasi
		Meningkatkan Pembangunan rumah untuk layak huni bagi Masyarakat yang bermukim dikawasan Kumuh, Masyarakat pedesaan kategori miskin, Masyarakat korban bencana dan korban relokasi program pemerintah/daerah	Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman kumuh melalui peremajaan dan Pembangunan termasuk penyediaan PSU, Pembangunan Rumah untuk korban Bencana dan korban Relokasi program pemerintah Daerah serta Bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah
		Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana akses air minum	Penyediaan dan Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di lokasi daerah pedesaan terpencil dan daerah yang belum punya akses PDAM



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatnya kualitas penataan ruang	Meningkatkan Penataan Ruang Wilayah melalui penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), Penertiban dan Pngawasan terhadap penegakan hukum yang terkait Tata Ruang.	Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang dengan prioritas pada Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target dan tujuan Renstra. Perumusan Arah Kebijakan pada Renstra Dinas PUPR Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5.
Perumusan Arah Kebijakan**

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas infastruktur kewilayahan yang tangguh terhadap potensi bencana dan lingkungan	Peningkatan konektivitas dengan memperbanyak penanganan jalan dan jembatan yang kategori rusak dan rusak berat serta merevisi SK Bupati tentang Jalan Wewenang Kabupaten karena ada beberapa jalan Kabupaten yang sudah menjadi wewenang provinsi	



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Peningkatan dan pengelolaan Sumber daya air dengan prioritas pada peningkatan kapasitas/ daya tampung bangunan air dan penyediaan air irigasi	
			Pembangunan dan Penyediaan SPALD setempat	
			Penyediaan dan Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di lokasi daerah pedesaan terpencil dan daerah yang belum punya akses PDAM	
			Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang dengan prioritas pada Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	
			Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman kumuh melalui peremajaan dan Pembangunan termasuk penyediaan PSU, Pembangunan Rumah untuk korban Bencana dan korban Relokasi program pemerintah Daerah serta Bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 ini memuat perspektif kebijakan Pembangunan yang akan dilakukan dalam 5 (lima) Tahun ke depan yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan ataupun subkegiatan. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja tahun 2025-2030 , merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan penyusunan Renja Tahun 2030 nantinya. Adapun Teknik perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel 4.1.
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan**

NSPK DAN SASARAN TUJUAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah dan terpenuhinya kesesuaian pemanfaatan ruang	1.meningkatnya kualitas infrastruktur	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
					Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10.2.01. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	



NSPK DAN SASARAN TUJUAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)		
					Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)		
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi		Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)		



NSPK DAN SASARAN TUJUAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Rasio Bangunan Pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.03.02.2.01- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Mota	
					Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya Melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)	1.03.02.2.01.0078 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	
					Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi (KM)	1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	
					Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
					Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.01.0115 - Pembangunan Tanggul Sungai	

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI**



NSPK DAN SASARAN TUJUAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)		1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	



NSPK DAN SASARAN TUJUAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan (UNIT)	1.03.02.2.02.0048 - Peningkatan Bendung Irigasi	
					Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (UNIT)	1.03.02.2.02.0054 - Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	
					Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))		
					Persentase Sanitasi Layak	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Tersusunnya Rencana kebijakan, strategi dan Teknis SPALD dalam daerah Kabupaten		1.03.05.2.01 – Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI**



NSPK DAN SASARAN TUJUAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.03.05.2.01.0022 – Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala permukiman	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	1.03.05.2.01.0039 – Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat	
					Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.03.05.2.01.0041 – Penyusunan Rencana kebijakan, strategis dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota (%)	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	



NSPK DAN SASARAN TUJUAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase Penduduk berakses air minum jaringan perpipaan(%)		1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	



NSPK DAN SASARAN TUJUAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Meningkatkan kualitas penataan ruang			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Tersedianya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang (Laporan)	1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	



NSPK DAN SASARAN TUJUAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah		1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/ Kota (Dokumen)	1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
				Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah		1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
				Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah		1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	1.03.12.2.04.0006 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	



NSPK DAN SASARAN TUJUAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
				Panjang Drainase yang terbangun terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten / kota		1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
				Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)		1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	
						1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN TUJUAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Ton/hari)	1.03.07.2.01.0015 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung		Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten		1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN TUJUAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
				Jumlah Pengawasan, Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah		1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN TUJUAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(2) Meningkatnya kualitas prasarana permukiman	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 – PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Persentase data penerima rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten		1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/ Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya pembangunan/ rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten		1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	



NSPK DAN SASARAN TUJUAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terreview/Terlegalisasi (Dokumen)	1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
				Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani		1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
					Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	



NSPK DAN SASARAN TUJUAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah		2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 5) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Keuangan SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1). Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi/Sungai
 - 3) Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
 - 4) Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai
 - 5) Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 6) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai
- b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Bendung Irigasi
 - 3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - 4) Sub Kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi
 - 5) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
 - 6) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
 - 7) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota



1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
2. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
3. Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan
4. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM

Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

a. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Pemukiman
- 2) Sub Kegiatan Sub system Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat
- 3) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD)

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan



Program Penataan Bangunan Gedung

a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Kebikalan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTBG), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
- 2) Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

Program Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
- 3) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan



- 5) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
- 6) Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan
- 7) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
- 8) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

- 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi jabatan Aparator, Teknisi dan Analis
- 3) Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi jabatan Operator, Teknisi dan Analis

b. Kegiatan Penyelenggaran Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
- 3) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI

c. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

- 1). Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
- 2). Penyusunan SOP / Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi



Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
 - 2) Sub Kegiatan Penataan RDTR Kabupaten/Kota
 - 3) Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
- b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
- c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
- d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Audit Tata Ruang
 - 2) Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang

Program Pengembangan Perumahan

- a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
 - 2) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota



- b. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
 - 2). Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat yang terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota

Program Kawasan Permukiman

- a. Kegiatan Penataan dan Kawasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - 1). Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
- c. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - 1). Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - 2). Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

- a. Kegiatan Urusan Penyediaan PSU Perumahan
 - 1). Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
 - 2). Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - 3). Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

- a. Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
 - 1). Sub kegiatan Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di wilayah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Penetapan Lokasi pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum di Tingkat kabupaten/kota



- 1). Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Tingkat kabupaten/kota
- Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**
- a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 1). Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 disajikan pada **Tabel 4.2.** pada halaman Lampiran dari dokumen ini.

Sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih, maka terdapat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Priotitas dalam mendukung Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum pada **tabel 4. 3.** dibawah ini :





Tabel 4.3.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan Masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses Masyarakat terhadap banjir	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai 1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing 1.03.02.2.01.0115 - Pembangunan Tanggul Sungai 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
2.	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses Masyarakat terhadap system penyediaan air minum	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
3.	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase Perkotaan	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	



4.	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan 1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan 1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan 1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan 1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	
5.	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata		
6.	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		

4.2.Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Untuk mendukung keberhasilan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah periode 2025-2029 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Adapaun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci dan target capaian lima tahun mendatang bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUPR Kabupaten Kerinci 2025-2029

No.	Indikator	Baseline 2024	Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Infrastruktur	67,75	70,18	72,60	74,89	77,42	80	81,69	



No.	Indikator	Baseline 2024	Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	97,70	97,80	98	98,09	98,19	98,29	98,39	

Dalam menentukan dan mendapatkan capaian kinerja pada kedua Indikator tersebut , diperlukan Metadata ataupun perumusan, penjelasan dalam mengolah data, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5.
Metadata Sasaran Kinerja Dinas PUPR Kab. Kerinci
Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Metodologi	Formula	Baseline 2024	Target Kinerja					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.meningkatn ya kualitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Indeka Infrastrukturu r dihitung dari pembobotan capaian kinerja pada persentase kondisi jalan mantap kab/kota; ditambah capaian kinerja persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik; ditambah capaian kinerja pada Rumah Tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan; ditambah capaian kinerja persentase rumah layak huni;	{25% (capaian kinerja kondisi mantap jalan Kab/Kota) + 25% (capaian kinerja persentase irigasi kabupaten dalam kondisi bai) + 25% (capaian kinerja Rumah Tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan) + 25% (capaian kinerja Persentase Rumah Layak Huni) dikali 100}	67,75	70,18	72,6	74,89	77,42	80	81,69



Sasaran	Indikator Kinerja	Metodologi	Formula	Baseline 2024		Target Kinerja				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Sumber Data:							
			Capaian kinerja persentase kondisi mantap jalan kab/kota	45,50	49,72	51,20	52,72	54,19	55,91	57,71
			Capaian kinerja persentase irigasi kabupaten kondisi baik	52,80	64,50	71,29	78,79	87,08	96,24	100
			Capaian kinerja rumah tangga yang punya akses air minum jaringan perpipaan	53,52	92,17	96,17	100	100	100	100
			Capaian kinerja persentase rumah layak huni	70	78,44	82,23	86,19	90,35	94,71	99,07
2.Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dihitung dari luas lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang dibagi luas lahan keseluruhan dalam kabupaten kerinci dikali 100	(Luas lahan yang sesuai dengan RTRW / Luas lahan keseluruhan dalam RTRW dikali 100)	97,7	97,8	98	98,09	98,19	98,29	98,39

Masih ada Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah lainnya yaitu melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mana Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci menangani 3 (tiga) urusan yakni:

1. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota
2. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota
3. Urusan Pertanahan Kabupaten/Kota

Untuk lebih jelasnya terkait target dan capaian IKK Dinas PUPR Kabupaten Kerinci tahun 2025-2029, bisa terlihat pada tabel 4.6. berikut ini



Tabel 4.6.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PUPR Kabupaten Kerinci

No	Indikator	Status	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	positif	%	52,80	64,50	71,29	78,79	7,08	96,24	100	
2	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	positif	%	45,50	49,72	51,20	52,72	54,29	55,91	57,71	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	positif	%	2,14	4,42	5,46	6,75	8,33	10,29	12,25	
4	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		%	68,10	71	73,42	75,46	77,21	78,33	79,45	
6	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	positif	%	97,80	97,80	98,09	98,39	98,78	99,28	99,88	
	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
7	Persentase Rumah Layak Huni	positif	%	77,39	77,39	77,64	77,89	78,14	78,39	82,00	
8	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	positif	%	53,52	92,17	96,17	100	100	100	100	
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman			70,00	78,44	82,23	86,19	90,36	94,71	99,07	
	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
10	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

Dari tabel diatas, dapat kita simpulkan bahwa masih ada beberapa indikator yang masih belum bisa diukur pencapaian ataupun target yang akan dicapai disebabkan oleh keterbatasan data yang dimiliki Perangkat Daerah (PD).

Hal ini merupakan sebuah tantangan baik bagi bidang terkait maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci untuk sesegera mungkin mencari solusi terbaik.

Selain itu masih terdapat Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas



Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2025-2029 yang pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dan program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau impact.

Adapun Indikator Kinerja Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7.

Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kerinci

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	%	45,50	49,7 2	51,2 0	52,72	54,29	55,91	57,71	
2.	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%	53,52	92,1 7	96,1 7	100	100	100	100	
3.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	%	97,80	97,8 0	98,0 9	98,3 9	98,7 8	99,2 8	99,8 8	
4.	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	0	64,5 0	71,2 9	78,7 9	87,0 8	96,2 4	100	
5.	Persentase Rumah Layak Huni	%	77,39	77,3 9	77,6 4	77,8 9	78,1 4	78,3 9	82,0 0	
6.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0	71	73,4 2	75,4 6	77,2 1	78,3 3	79,4 5	
7.	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	4	4,42	5,46	6,75	8,33	10,2 9	12,2 5	
8.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	



9.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	70,00	78,4 4	82,2 3	86,1 9	90,3 5	94,7 1	99,0 7	
10	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	100	100	



BAB V

P E N U T U P

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 memuat secara transparan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dicapai dengan mereview tujuan dan sasaran, capaian Program dan kegiatan serta capaian pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci untuk 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 – 2029.

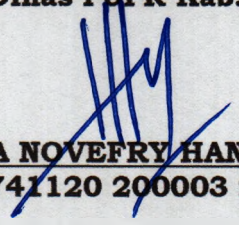
Apabila dalam periode pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 dihadapkan padahal-hal di luar kendali Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci, maka strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaan.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA Dinas PUPR Tahun 2025-2029 perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan RENSTRA lima tahun kedepan.

Renstra ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu masukan dan kritik yang bersifat membangun dan inovatif sangat diharapkan demi kesempurnaan dimasa mendatang.

Siulak, November 2025

Kepala Dinas PUPR Kab. Kerinci


Ir. MAYA NOVEFRY HANDAYANI, ST
NIP. 19741120 200003 2 005



LAMPIRAN

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**

[illegible]

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					184.738.235.815,00		189.601.000.327,30		193.336.910.333,86		196.447.431.240,51		200.350.558.045,52	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.856.702.063,00		17.193.836.104,26		17.537.712.826,35		17.888.467.082,87		18.246.236.424,53	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif	Nilai SAKIP (Kategori)	B	B	B	16.856.702.063,00	B	17.193.836.104,26	B	17.537.712.826,35	B	17.888.467.082,87	B	18.246.236.424,53	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					17.876.815.418,00		18.234.351.726,36		18.599.038.760,89		18.971.019.536,09		19.350.439.926,83	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	52,80	53,80	54,80	17.876.815.418,00	55,80	18.234.351.726,36	56,80	18.599.038.760,89	57,80	18.971.019.536,09	58,80	19.350.439.926,83	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	0,71	0	16,11		16,22		17,48		17,69		17,90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					5.735.416.540,00		5.850.124.870,80		5.967.127.368,22		6.086.469.915,58		6.208.199.313,89	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota (%)	2,0	2,0	2,5	5.735.416.540,00	5,0	5.850.124.870,80	7,5	5.967.127.368,22	10	6.086.469.915,58	12,5	6.208.199.313,89	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					300.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	40	45	50	300.000.000,00	52	2.000.000.000,00	54	2.000.000.000,00	56	2.000.000.000,00	58	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					600.000.000,00		612.000.000,00		624.240.000,00		636.724.800,00		649.459.296,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	74,83	78,44	82,23	600.000.000,00	86,19	612.000.000,00	90,35	624.240.000,00	94,71	636.724.800,00	94,71	649.459.296,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					3.799.168.672,00		3.875.152.045,44		3.952.655.086,35		4.031.708.188,08		4.112.342.351,84	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	37,60	39,11	40,11	3.799.168.672,00	41,11	3.875.152.045,44	42,11	3.952.655.086,35	43,11	4.031.708.188,08	44,11	4.112.342.351,84	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					200.000.000,00		204.000.000,00		208.080.000,00		212.241.600,00		216.486.432,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	67,75	70,18	72,6	200.000.000,00	74,89	204.000.000,00	77,42	208.080.000,00	79,99	212.241.600,00	81,69	216.486.432,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					28.380.000.000,00		28.947.600.000,00		29.526.552.000,00		30.117.083.040,00		30.719.424.700,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	84,61	85,00	85,52	28.380.000.000,00	86,52	28.947.600.000,00	87,52	29.526.552.000,00	88,52	30.117.083.040,00	89,52	30.719.424.700,00	Dinas/Badan yang merangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					28.910.174.018,00		29.488.377.498,36		30.078.145.048,33		30.679.707.949,29		31.293.302.108,28	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	100	100	100	28.910.174.018,00	100	29.488.377.498,36	100	30.078.145.048,33	100	30.679.707.949,29	100	31.293.302.108,28	Dinas/Badan yang merangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					79.185.256.173,00		80.768.961.296,46		82.384.340.522,39		84.032.027.332,84		85.712.667.879,49	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	45,50	49,72	51,20	79.185.256.173,00	52,72	80.768.961.296,46	54,29	82.384.340.522,39	55,91	84.032.027.332,84	56,91	85.712.667.879,49	Dinas/Badan yang merangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					644.702.731,00		657.596.785,62		670.748.721,33		684.163.695,76		697.846.969,66	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	68,10	70,18	73,42	644.702.731,00	75,46	657.596.785,62	77,21	670.748.721,33	78,33	684.163.695,76	79,12	697.846.969,66	Dinas/Badan yang merangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.250.000.000,00		1.788.000.000,00		1.788.270.000,00		1.107.818.100,00		1.144.152.643,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) (%)	97,70	97,80	98,00	2.250.000.000,00	98,09	1.789.000.000,00	98,19	1.788.270.000,00	98,29	1.107.818.100,00	98,39	1.144.152.643,00	Dinas/Badan yang merangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					8.475.564.385,00		8.647.075.672,70		8.822.077.188,15		9.000.640.529,88		9.182.838.794,47	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					822.792.000,00		839.247.840,00		856.032.796,80		873.153.452,74		890.616.521,79	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	822.792.000,00	100	839.247.840,00	100	856.032.796,80	100	873.153.452,74	100	890.616.521,79	Dinas/Badan yang merangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					6.352.772.385,00		6.479.827.832,70		6.609.424.389,35		6.741.612.877,14		6.876.445.134,68	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	100	100	100	6.352.772.385,00	100	6.479.827.832,70	100	6.609.424.389,35	100	6.741.612.877,14	100	6.876.445.134,68	Dinas/Badan yang merangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					200.000.000,00		206.000.000,00		212.180.000,00		218.545.400,00		225.101.762,00	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	75	80	85	200.000.000,00	90	206.000.000,00	95	212.180.000,00	98	218.545.400,00	100	225.101.762,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					1.100.000.000,00		1.122.000.000,00		1.144.440.000,00		1.167.328.800,00		1.190.675.376,00	
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	100	100	100	1.100.000.000,00	100	1.122.000.000,00	100	1.144.440.000,00	100	1.167.328.800,00	100	1.190.675.376,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					8.000.000.000,00		8.240.000.000,00		8.487.200.000,00		8.741.816.000,00		9.004.070.480,00	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					8.000.000.000,00		8.240.000.000,00		8.487.200.000,00		8.741.816.000,00		9.004.070.480,00	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100	100	100	8.000.000.000,00	100	8.240.000.000,00	100	8.487.200.000,00	100	8.741.816.000,00	100	9.004.070.480,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
TOTAL KESELURUHAN					201213800000,00		206488076000,00		210846187520,01		214189887770,39		218537487318,99	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat							
- Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Wilayah dan Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan serta Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap			Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	
					Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	
		Meningkatnya Jaringan Irigasi dalam kondisi baik			Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)		
					Rasio luas daerah irigasi kewenangkabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)		
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi		Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Rasio Bangunan Pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (UNIT)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan (UNIT)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan (UNIT)	1.03.02.2.02.0048 - Peningkatan Bendung Irigasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)	1.03.02.2.01.0078 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	
					Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
					Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.01.0115 - Pembangunan Tanggul Sungai	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (UNIT)	1.03.02.2.02.0054 - Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	
		Meningkatnya Pelayanan terhadap air limbah domestik			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))		
					Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
		Meningkatnya layanan persampahan regional		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA Kewenangan Kabupaten yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
		Meningkatnya aksesibilitas Penduduk terhadap Air Bersih			Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)		
					Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten /kota (%)	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
					Persentase Penduduk berakses air minum jaringan perpipaan(%)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Peresentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) (%)		
		Meningkatnya Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Tersedianya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Peresentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) (%)	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
				Tersedianya dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
				Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
				Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	1.03.12.2.04.0006 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	
					Persentase Rumah Layak Huni (%)		
					Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak		
				Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan			Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Panjang Drainase yang terbangun terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah		Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	
				Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Ton/hari)	1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Ton/hari)	1.03.07.2.01.0015 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung		Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
				Jumlah Pengawasan, Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Persentase data penerima rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pembangunan/rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
					Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
				Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	%	45,50	49,72	51,20	52,72	54,29	55,91	57,71	
2	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%	53,52	92,17	96,17	100	100	100	100	
3	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	%	97,80	97,80	98,09	98,39	98,78	99,28	99,88	
4	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	0	64,50	71,29	78,79	87,08	96,24	100	
5	Persentase Rumah Layak Huni	%	77,39	77,39	77,84	77,89	78,14	78,39	82,00	
6	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0	71	73,42	75,46	77,21	78,33	79,45	
7	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	4	4,42	5,46	6,75	8,33	10,29	12,25	
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	70,00	78,44	82,23	86,19	9,035	94,71	99,07	
10	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	100	100	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				184.738.235.615,00		189.801.000.327,30		193.336.910.333,86		196.447.431.240,51		200.350.558.045,52		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.856.702.083,00		17.193.836.104,28		17.537.712.826,35		17.888.467.082,87		18.246.236.424,53		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif	Nilai SAKIP (Kategori)	B	B	16.856.702.083,00	B	17.193.836.104,28	B	17.537.712.826,35	B	17.888.467.082,87	B	18.246.236.424,53	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				365.800.000,00		376.774.000,00		388.077.220,00		399.719.538,00		411.711.123,00		
Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, panganggaran dan laporan evaluasi perangkat daerah (%)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	365.800.000,00	2	376.774.000,00	2	388.077.220,00	2	399.719.538,00	2	411.711.123,00		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7		7		7		7					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				71.500.000,00		73.645.000,00		75.854.350,00		78.129.981,00		80.473.880,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	71.500.000,00	7	73.645.000,00	7	75.854.350,00	7	78.129.981,00	7	80.473.880,00		
1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				68.000.000,00		70.040.000,00		72.141.200,00		74.305.436,00		76.534.569,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	68.000.000,00	2	70.040.000,00	2	72.141.200,00	2	74.305.436,00	2	76.534.569,00		
1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				43.500.000,00		44.805.000,00		46.149.150,00		47.533.625,00		48.959.633,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	43.500.000,00	2	44.805.000,00	2	46.149.150,00	2	47.533.625,00	2	48.959.633,00		
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				118.000.000,00		121.540.000,00		125.186.200,00		128.941.786,00		132.810.040,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	118.000.000,00	2	121.540.000,00	2	125.186.200,00	2	128.941.786,00	2	132.810.040,00		
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				64.800.000,00		66.744.000,00		68.746.320,00		70.808.710,00		72.932.971,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	64.800.000,00	2	66.744.000,00	2	68.746.320,00	2	70.808.710,00	2	72.932.971,00		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.601.521.239,00		12.979.566.876,00		13.368.953.882,00		13.770.022.499,00		14.183.123.173,00		
Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	3	12.601.521.239,00	3	12.979.566.876,00	3	13.368.953.882,00	3	13.770.022.499,00	3	14.183.123.173,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	94	94		94		94		94		94			
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.900.899.000,00		12.257.925.970,00		12.625.663.749,00		13.004.433.662,00		13.394.566.671,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	94	94	11.900.899.000,00	94	12.257.925.970,00	94	12.625.663.749,00	94	13.004.433.662,00	94	13.394.566.671,00		
1.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				620.000.000,00		638.800.000,00		657.758.000,00		677.490.740,00		697.815.462,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2	2	620.000.000,00	2	638.800.000,00	2	657.758.000,00	2	677.490.740,00	2	697.815.462,00		
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				28.000.000,00		28.780.000,00		27.583.400,00		28.410.902,00		29.263.229,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	28.000.000,00	2	28.780.000,00	2	27.583.400,00	2	28.410.902,00	2	29.263.229,00		
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				54.622.239,00		56.260.906,00		57.948.733,00		59.687.195,00		61.477.811,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	3	54.622.239,00	3	56.260.906,00	3	57.948.733,00	3	59.687.195,00	3	61.477.811,00		
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				23.000.000,00		23.690.000,00		24.400.700,00		25.132.721,00		25.886.703,00		
Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah (%)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	23.000.000,00	1	23.690.000,00	1	24.400.700,00	1	25.132.721,00	1	25.886.703,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				23.000.000,00		23.690.000,00		24.400.700,00		25.132.721,00		25.886.703,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	23.000.000,00	1	23.690.000,00	1	24.400.700,00	1	25.132.721,00	1	25.886.703,00		
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				143.571.700,00		147.878.851,00		152.315.217,00		156.884.873,00		161.591.214,00		
Persentase ASN yang mendapatkan pelatihan formal maupun informal (%)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	74	74	143.571.700,00	74	147.878.851,00	74	162.315.217,00	74	156.884.873,00	74	161.591.214,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	74	74	74	74		74							
1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				63.345.000,00		65.245.350,00		67.202.711,00		69.218.792,00		71.295.356,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	74	74	63.345.000,00	74	65.245.350,00	74	67.202.711,00	74	69.218.792,00	74	71.295.356,00		
1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				80.226.700,00		82.633.501,00		85.112.506,00		87.665.881,00		90.295.858,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	74	74	80.226.700,00	74	82.633.501,00	74	85.112.506,00	74	87.665.881,00	74	90.295.858,00		
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				616.448.837,00		643.915.482,00		663.232.947,00		683.129.937,00		703.623.835,00		
Persentase Layanan administrasi perangkat daerah (%)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15	10	616.448.837,00	10	643.915.482,00	10	663.232.947,00	10	683.129.937,00	10	703.623.835,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	20	20	20		20							
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25	25	25	25		25							
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15	15	15		15							
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				17.138.837,00		17.714.802,00		18.246.246,00		18.793.634,00		19.357.443,00		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15	17.138.837,00	15	17.714.802,00	15	18.246.246,00	15	18.793.634,00		19.357.443,00		
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				26.000.000,00		26.563.026,00		27.359.917,00		28.180.715,00		29.026.136,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25	25	26.000.000,00	25	26.563.026,00	25	27.359.917,00	25	28.180.715,00	25	29.026.136,00		
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				273.310.000,00		281.509.815,00		289.955.109,00		298.653.783,00		307.613.376,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15	10	273.310.000,00	10	281.509.815,00	10	289.955.109,00	10	298.653.783,00	10	307.613.376,00		
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000,00		318.127.839,00		327.671.675,00		337.501.825,00		347.626.880,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	20	300.000.000,00	20	318.127.839,00	20	327.671.675,00	20	337.501.825,00	20	347.626.880,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.200.000.000,00		2.149.477.913,26		2.042.023.889,35		1.927.907.473,87		1.806.860.028,53		
Persentase pengadaan BMD Pada Perangkat Daerah (%)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	15	2.200.000.000,00	15	2.149.477.913,26	15	2.042.023.889,35	15	1.927.907.473,87	15	1.806.860.028,53		
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	2		1		1		4		4			
1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.000.000.000,00		515.000.000,00		530.450.000,00		546.363.500,00		562.754.405,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	2	1.000.000.000,00	1	515.000.000,00	1	530.450.000,00	4	546.363.500,00	4	562.754.405,00		
1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				1.000.000.000,00		1.428.477.913,26		1.299.393.889,35		1.162.998.573,87		1.019.003.881,53		
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1	1	1.000.000.000,00	1	1.428.477.913,26	1	1.299.393.889,35	1	1.162.998.573,87	1	1.019.003.881,53		
1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000,00		206.000.000,00		212.180.000,00		218.545.400,00		225.101.762,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	15	200.000.000,00	15	206.000.000,00	15	212.180.000,00	15	218.545.400,00	15	225.101.762,00		
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				220.358.377,00		227.472.364,00		234.296.535,00		241.325.431,00		248.565.194,00		
Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Kantor (%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	220.358.377,00	12	227.472.364,00	12	234.296.535,00	12	241.325.431,00	12	248.565.194,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85.000.000,00		88.053.236,00		90.894.833,00		93.415.678,00		96.218.148,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	5	85.000.000,00	5	88.053.236,00	5	90.894.833,00	5	93.415.678,00	5	96.218.148,00		
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				135.358.377,00		139.419.128,00		143.601.702,00		147.909.753,00		152.347.048,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	135.358.377,00	12	139.419.128,00	12	143.601.702,00	12	147.909.753,00	12	152.347.048,00		
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				686.001.910,00		645.060.618,00		664.412.436,00		684.344.810,00		704.875.154,00		
Persentase terpeliharanya mobil dinas operasional, lapangan dan alat berat (%)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	686.001.910,00	10	645.060.618,00	10	664.412.436,00	10	684.344.810,00	10	704.875.154,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	16	16		16		16		16		16			
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000,00		193.168.672,00		198.963.732,00		204.932.644,00		211.080.623,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	200.000.000,00	5	193.168.672,00	5	198.963.732,00	5	204.932.644,00	5	211.080.623,00		
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya				200.000.000,00		159.564.134,00		164.351.058,00		169.281.590,00		174.360.038,00		
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	16	16	200.000.000,00	16	159.564.134,00	16	164.351.058,00	16	169.281.590,00	16	174.360.038,00		
1.03.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				86.001.910,00		88.581.967,00		91.239.426,00		93.976.609,00		96.795.907,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	86.001.910,00	10	88.581.967,00	10	91.239.426,00	10	93.976.609,00	10	96.795.907,00		
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000,00		203.745.845,00		209.858.220,00		216.153.967,00		222.638.586,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	200.000.000,00	1	203.745.845,00	1	209.858.220,00	1	216.153.967,00	1	222.638.586,00		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				17.876.815.418,00		18.234.351.728,36		18.599.038.760,89		18.971.019.536,09		19.350.439.926,83		
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	52,80	54,80	17.876.815.418,00	55,80	18.234.351.728,36	56,80	18.599.038.760,89	57,80	18.971.019.536,09	58,80	19.350.439.926,83	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	0,71	16,11		16,22		17,48		17,69		17,90			
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10.008.157.508,00		12.308.402.234,00		9.827.654.301,00		9.498.893.164,00		9.757.140.522,86		
Rasio Bangunan Pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)	1	1	10.008.157.508,00	1	12.308.402.234,00	1	9.827.654.301,00	1	9.498.893.164,00	1	9.757.140.522,86		
	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	0	0		1		1		1		1			
	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	0	0		0		1		1		1			
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	2	12		12		12		12		12			
	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	1,5	1,5		1,5		1,5		1,5		1,5			
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.03.02.2.01.0078 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				120.170.409,00		123.775.521,00		127.488.787,00		131.313.451,00		135.252.854,00		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)	1	1	120.170.409,00	1	123.775.521,00	1	127.488.787,00	1	131.313.451,00	1	135.252.854,00		
1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				0,00		0,00		150.000.000,00		154.500.000,00		159.135.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	0	0	0,00	0	0,00	1	150.000.000,00	1	154.500.000,00	1	159.135.000,00		
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai				5.824.999.819,00		5.999.749.608,00		3.179.742.096,00		3.651.343.593,00		3.724.370.464,86		
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	2	12	5.824.999.819,00	12	5.999.749.608,00	12	3.179.742.096,00	12	3.651.343.593,00	12	3.724.370.464,86		
1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing				3.536.478.730,00		3.645.663.092,00		3.755.032.985,00		3.867.683.974,00		3.983.714.493,00		
Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	1,5	1,5	3.539.478.730,00	1,5	3.645.663.092,00	1,5	3.755.032.985,00	1,5	3.867.683.974,00	1,5	3.983.714.493,00		
1.03.02.2.01.0115 - Pembangunan Tanggul Sungai				0,00		2.000.000.000,00		2.060.000.000,00		1.121.800.000,00		1.165.454.000,00		
Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	0	0	0,00	1	2.000.000.000,00	1	2.060.000.000,00	1	1.121.800.000,00	1	1.165.454.000,00		
1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				253.508.750,00		261.114.013,00		268.947.433,00		277.015.856,00		285.326.332,00		
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	3	3	253.508.750,00	3	261.114.013,00	3	268.947.433,00	3	277.015.856,00	3	285.326.332,00		
1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				270.000.000,00		278.100.000,00		286.443.000,00		295.036.290,00		303.887.379,00		
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	1	1	270.000.000,00	1	278.100.000,00	1	286.443.000,00	1	295.036.290,00	1	303.887.379,00		
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				7.868.657.910,00		5.925.949.492,36		8.771.384.459,89		9.472.326.372,09		9.593.299.403,97		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	2	2	7.888.857.910,00	2	5.925.949.492,36	2	8.771.384.459,89	2	9.472.328.372,09	2	9.593.299.403,97		
	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	5	5		5		5		5					
	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan (UNIT)	0	0		0		0		1		1			
	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	0	0		0		0		1		1			
	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (UNIT)	0	0		0		0		1		1			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0	0		0		0		1		1			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	3	3		3		3		3		3			
1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				6.109.217.060,00		4.131.319.825,36		6.940.862.199,55		3.549.737.850,40		3.522.259.111,84		
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	2	2	6.109.217.060,00	2	4.131.319.825,36	2	6.940.862.199,55	2	3.549.737.850,40	2	3.522.259.111,84		
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				0,00		0,00		0,00		1.000.000.000,00		1.020.000.000,00		
Terhabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000.000,00	1	1.020.000.000,00		
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				1.453.093.100,00		1.482.154.962,00		1.511.798.061,00		1.587.834.064,00		1.619.590.745,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	3	3	1.453.093.100,00	3	1.482.154.962,00	3	1.511.798.061,00	3	1.587.834.064,00	3	1.619.590.745,00		
1.03.02.2.02.0048 - Peningkatan Bendung Irigasi				0,00		0,00		0,00		1.000.000.000,00		1.030.000.000,00		
Meningkatnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan (UNIT)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000.000,00	1	1.030.000.000,00		
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa				306.347.750,00		312.474.705,00		318.724.199,34		334.754.457,89		341.449.547,13		
Terusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa (Dokumen)	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	5	5	306.347.750,00	5	312.474.705,00	5	318.724.199,34	5	334.754.457,89	5	341.449.547,13		
1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi				0,00		0,00		0,00		1.000.000.000,00		1.030.000.000,00		
Terhabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000.000,00	1	1.030.000.000,00		
1.03.02.2.02.0054 - Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi				0,00		0,00		0,00		1.000.000.000,00		1.030.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (UNIT)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000.000,00	1	1.030.000.000,00		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				5.735.416.540,00		5.850.124.870,80		5.967.127.368,22		6.086.469.915,58		6.208.199.313,89		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten /kota (%)	2,0	2,5	5.735.416.540,00	5,0	5.850.124.870,80	7,5	5.967.127.368,22	10	6.086.469.915,58	12,5	6.208.199.313,89	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				5.735.416.540,00		5.850.124.870,80		5.967.127.368,22		6.086.469.915,58		6.208.199.313,89		
Persentase Penduduk berakses air minum jaringan perpipaan(%)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0	0	5.735.416.540,00	2	5.850.124.870,80	2	5.967.127.368,22	2	6.086.469.915,58	2	6.208.199.313,89		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1	1		1		1		1		1			
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	6	6		6		6		6		6			
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				958.972.230,00		987.741.397,00		1.017.373.639,00		1.047.894.848,00		1.079.331.693,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1	1	958.972.230,00	1	987.741.397,00	1	1.017.373.639,00	1	1.047.894.848,00	1	1.079.331.693,00		
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				2.000.000.000,00		2.040.000.000,00		2.080.800.000,00		2.122.416.000,00		2.164.864.320,00		
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	6	6	2.000.000.000,00	6	2.040.000.000,00	6	2.080.800.000,00	6	2.122.416.000,00	6	2.164.864.320,00		
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				2.776.444.310,00		1.831.973.196,00		1.868.812.660,00		1.905.984.913,00		1.944.104.612,00		
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1	1	2.776.444.310,00	1	1.831.973.196,00	1	1.868.812.660,00	1	1.905.984.913,00	1	1.944.104.612,00		
1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0,00		990.410.277,80		1.000.341.069,22		1.010.174.154,58		1.019.898.688,89		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	2	990.410.277,80	2	1.000.341.069,22	2	1.010.174.154,58	2	1.019.898.688,89		
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				300.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	40	50	300.000.000,00	52	2.000.000.000,00	54	2.000.000.000,00	56	2.000.000.000,00	58	2.000.000.000,00	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA Kewenangan Kabupaten yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen) Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	1	1	300.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00		
		0	0		0		0		0		0			
1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan				300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	1	1	300.000.000,00	1	306.000.000,00	1	312.120.000,00	1	318.362.400,00	1	324.729.648,00		
1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				0,00		1.694.000.000,00		1.687.880.000,00		1.681.637.800,00		1.675.270.352,00		
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	0	0	0,00	0	1.694.000.000,00	0	1.687.880.000,00	0	1.681.637.800,00	0	1.675.270.352,00		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				600.000.000,00		612.000.000,00		624.240.000,00		636.724.800,00		649.459.296,00		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	74,83	82,23	600.000.000,00	86,19	612.000.000,00	90,35	624.240.000,00	94,71	636.724.800,00	94,71	649.459.296,00	1.03.1.04.2.10.01.00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000,00		612.000.000,00		624.240.000,00		636.724.800,00		649.459.296,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M ³ /Hari)	9	0	600.000.000,00	0	612.000.000,00	0	624.240.000,00	0	636.724.800,00	0	649.459.296,00		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				400.000.000,00		408.000.000,00		416.160.000,00		424.483.200,00		432.972.864,00		
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M ³ /Hari)	9	0	400.000.000,00	0	408.000.000,00	0	416.160.000,00	0	424.483.200,00	0	432.972.864,00		
1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				200.000.000,00		204.000.000,00		208.080.000,00		212.241.600,00		216.486.432,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	204.000.000,00	1	208.080.000,00	1	212.241.600,00	1	216.486.432,00		
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				3.799.168.672,00		3.875.152.045,14		3.952.855.086,35		4.031.708.188,08		4.112.342.351,84		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	37,60	40,11	3.799.168.672,00	41,11	3.875.152.045,44	42,11	3.952.655.086,35	43,11	4.031.708.188,08	44,11	4.112.342.351,84	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.799.168.672,00		3.875.152.045,44		3.952.655.086,35		4.031.708.188,08		4.112.342.351,84		
Panjang Drainase yang terbangun terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupeten / kota	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1	1	3.799.168.672,00	1	3.875.152.045,44	1	3.952.655.088,35	1	4.031.708.188,08	1	4.112.342.351,84		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	500	500		500		500		500		500			
1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				2.449.168.672,00		2.498.152.045,44		2.548.115.086,35		2.599.077.388,08		2.651.058.935,84		
Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	500	500	2.449.168.672,00	500	2.498.152.045,44	500	2.548.115.086,35	500	2.599.077.388,08	500	2.651.058.935,84		
1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan				400.000.000,00		408.000.000,00		416.160.000,00		424.483.200,00		432.972.864,00		
Terusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	1	1	400.000.000,00	1	408.000.000,00	1	416.160.000,00	1	424.483.200,00	1	432.972.864,00		
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				950.000.000,00		969.000.000,00		988.380.000,00		1.008.147.600,00		1.028.310.552,00		
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1	1	950.000.000,00	1	969.000.000,00	1	988.380.000,00	1	1.008.147.600,00	1	1.028.310.552,00		
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				200.000.000,00		204.000.000,00		208.080.000,00		212.241.600,00		216.486.432,00		
Terpenuhi rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	67,75	72,8	200.000.000,00	74,89	204.000.000,00	77,42	208.080.000,00	79,99	212.241.600,00	81,69	216.486.432,00	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		204.000.000,00		208.080.000,00		212.241.600,00		216.486.432,00		
Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Ton/hari)	0	0	200.000.000,00	0	204.000.000,00	0	208.080.000,00	0	212.241.600,00	0	216.486.432,00		
1.03.07.2.01.0015 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				200.000.000,00		204.000.000,00		208.080.000,00		212.241.600,00		216.486.432,00		
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Ton/hari)	0	0	200.000.000,00	0	204.000.000,00	0	208.080.000,00	0	212.241.600,00	0	216.486.432,00		
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				28.380.000.000,00		28.947.600.000,00		29.526.552.000,00		30.117.083.040,00		30.719.424.700,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	84,61	85,52	28.380.000.000,00	86,52	28.947.600.000,00	87,52	29.526.552.000,00	88,52	30.117.083.040,00	89,52	30.719.424.700,00	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				28.380.000.000,00		28.947.600.000,00		29.526.552.000,00		30.117.083.040,00		30.719.424.700,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	25	25	28.380.000.000,00	25	28.947.600.000,00	25	29.526.552.000,00	25	30.117.083.040,00	25	30.719.424.700,00		
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				160.000.000,00		163.200.000,00		166.464.000,00		169.793.280,00		173.189.146,00		
Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	1	1	160.000.000,00	1	163.200.000,00	1	166.464.000,00	1	169.793.280,00	1	173.189.146,00		
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				28.000.000.000,00		28.560.000.000,00		29.131.200.000,00		29.713.824.000,00		30.308.100.480,00		
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	25	25	28.000.000.000,00	25	28.560.000.000,00	25	29.131.200.000,00	25	29.713.824.000,00	25	30.308.100.480,00		
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				220.000.000,00		224.400.000,00		228.888.000,00		233.465.760,00		238.135.074,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1	1	220.000.000,00	1	224.400.000,00	1	228.888.000,00	1	233.465.760,00	1	238.135.074,00		
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				28.910.174.018,00		29.488.377.498,38		30.078.145.048,33		30.679.707.949,29		31.293.302.108,28		
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	100	100	28.910.174.018,00	100	29.488.377.498,38	100	30.078.145.048,33	100	30.679.707.949,29	100	31.293.302.108,28	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				28.910.174.018,00		29.488.377.498,38		30.078.145.048,33		30.679.707.949,29		31.293.302.108,28		
Jumlah Pengawasan, Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	100	100	28.910.174.018,00	100	29.488.377.498,38	100	30.078.145.048,33	100	30.679.707.949,29	100	31.293.302.108,28		
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				28.910.174.018,00		29.488.377.498,38		30.078.145.048,33		30.679.707.949,29		31.293.302.108,28		
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	100	100	28.910.174.018,00	100	29.488.377.498,38	100	30.078.145.048,33	100	30.679.707.949,29	100	31.293.302.108,28		
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				79.185.256.173,00		80.768.961.296,46		82.384.340.522,39		84.032.027.332,84		85.712.667.879,49		
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	45,50	51,20	79.185.256.173,00	52,72	80.768.961.296,46	54,29	82.384.340.522,39	55,91	84.032.027.332,84	56,91	85.712.667.879,49	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				79.185.256.173,00		80.768.961.296,46		82.384.340.522,39		84.032.027.332,84		85.712.667.879,49		
persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	21	21	79.185.256.173,00	21	80.768.961.296,46	21	82.384.340.522,39	21	84.032.027.332,84	21	85.712.667.879,49		
	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	7	7		7		7		7		7			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	250	250		250		250		250		250			
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	6	6		6		6		6		6			
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	5	5		5		5		5		5			
	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	54	54		54		54		54		54			
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	19	19		19		19		19		19			
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya (KM)	250	250		250		250		250		250			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				1.500.000.000,00		1.530.000.000,00		1.560.600.000,00		1.591.812.000,00		1.623.648.240,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	21	21	1.500.000.000,00	21	1.530.000.000,00	21	1.560.600.000,00	21	1.591.812.000,00	21	1.623.648.240,00		
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				515.000.000,00		525.300.000,00		535.806.000,00		546.522.120,00		557.452.562,00		
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	250	250	515.000.000,00	250	525.300.000,00	250	535.806.000,00	250	546.522.120,00	250	557.452.562,00		
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				2.119.101.500,00		2.161.483.530,00		2.204.713.201,00		2.248.807.465,00		2.293.783.614,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	250	250	2.119.101.500,00	250	2.161.483.530,00	250	2.204.713.201,00	250	2.248.807.465,00	250	2.293.783.614,00		
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				32.772.897.913,00		33.428.355.871,00		34.096.922.989,00		34.778.861.448,00		35.474.438.677,00		
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	7	7	32.772.897.913,00	7	33.428.355.871,00	7	34.096.922.989,00	7	34.778.861.448,00	7	35.474.438.677,00		
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				28.969.256.760,00		29.548.641.895,00		30.139.614.733,00		30.742.407.028,00		31.357.255.168,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	6	6	28.969.256.760,00	6	29.548.641.895,00	6	30.139.614.733,00	6	30.742.407.028,00	6	31.357.255.168,00		
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				5.000.000.000,00		5.100.000.000,00		5.202.000.000,00		5.306.040.000,00		5.412.160.800,00		
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	5	5	5.000.000.000,00	5	5.100.000.000,00	5	5.202.000.000,00	5	5.306.040.000,00	5	5.412.160.800,00		
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				309.000.000,00		315.180.000,00		321.483.600,00		327.913.272,00		334.471.537,00		
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	19	19	309.000.000,00	19	315.180.000,00	19	321.483.600,00	19	327.913.272,00	19	334.471.537,00		
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				8.000.000.000,00		8.160.000.000,48		8.323.199.999,39		8.489.663.999,84		8.659.457.281,49		
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun (Meter)	54	54	8.000.000.000,00	54	8.160.000.000,48	54	8.323.199.999,39	54	8.489.663.999,84	54	8.659.457.281,49		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				644.702.731,00		657.598.785,62		670.748.721,33		684.163.695,76		697.846.969,66		
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	68,10	73,42	644.702.731,00	75,46	657.598.785,62	77,21	670.748.721,33	78,33	684.163.695,76	79,12	697.846.969,66	1.03.1.04.2.10.01.00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				543.207.366,00		553.056.559,62		513.072.288,33		473.256.969,76		480.613.041,66		
Meningkatannya Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disiapkan (Dokumen)	0	0	543.207.366,00	0	553.056.559,62	0	513.072.288,33	1	473.256.969,76	1	480.613.041,66		
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	0	100			0		0		0		0		
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	100	100			100		100		100		100		
1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				60.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tertersedianya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	0	100	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				70.000.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1	1	70.000.000,00	1	50.000.000,00	1	51.500.000,00	1	53.045.000,00	1	54.636.350,00		
1.03.11.2.01.0015 - Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				0,00		0,00		0,00		50.000.000,00		51.500.000,00		
Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	51.500.000,00		
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				413.207.366,00		503.056.559,62		461.572.288,33		370.211.969,76		374.476.691,66		
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	100	100	413.207.366,00	100	503.056.559,62	100	461.572.288,33	100	370.211.969,76	100	374.476.691,66		
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				51.495.365,00		53.040.226,00		104.631.433,00		156.270.376,00		160.958.487,00		
Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1	1	51.495.365,00	1	53.040.226,00	1	104.631.433,00	11	156.270.376,00	1	160.958.487,00		
	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	0	0		0		0		1		1			
1.03.11.2.02.0012 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				0,00		0,00		0,00		100.000.000,00		103.000.000,00		
Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	1	103.000.000,00		
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				51.495.365,00		53.040.226,00		54.631.433,00		56.270.376,00		57.958.487,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1	1	51.495.365,00	1	53.040.226,00	1	54.631.433,00	11	56.270.376,00	1	57.958.487,00			
1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI				0,00		0,00		50.000.000,00		0,00		0,00			
Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00			
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		56.275.441,00			
Persentase Tertib Usaha Jasa Konatruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	5	5	50.000.000,00	5	51.500.000,00	5	53.045.000,00	5	54.636.350,00	5	56.275.441,00			
1.03.11.2.04.0005 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		56.275.441,00			
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	5	5	50.000.000,00	5	51.500.000,00	5	53.045.000,00	5	54.636.350,00	5	56.275.441,00			
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				2.250.000.000,00		1.769.000.000,00		1.788.270.000,00		1.107.818.100,00		1.144.152.643,00			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) (%)	97,70	98,00	2.250.000.000,00	98,09	1.769.000.000,00	98,19	1.788.270.000,00	98,29	1.107.818.100,00	98,39	1.144.152.643,00	1.03.1.04.2.10.01.00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				1.300.000.000,00		806.000.000,00		812.180.000,00		318.545.400,00		328.101.762,00			
Tersedianya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1	1	1.300.000.000,00	1	806.000.000,00	1	812.180.000,00	1	318.545.400,00	1	328.101.762,00			
	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	0	1		1		1		1						
	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		0		0				
	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		0		0		0		0				
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota				400.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Terpenyuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		103.000.000,00			
Tersampainya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	103.000.000,00			
1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		0,00		0,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				300.000.000,00		206.000.000,00		212.180.000,00		218.545.400,00		225.101.762,00		
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1	1	300.000.000,00	1	206.000.000,00	1	212.180.000,00	1	218.545.400,00	1	225.101.762,00		
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		103.000.000,00		106.090.000,00		109.272.700,00		112.550.881,00		
Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	103.000.000,00	1	106.090.000,00	1	109.272.700,00	1	112.550.881,00		
1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				100.000.000,00		103.000.000,00		106.090.000,00		109.272.700,00		112.550.881,00		
Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	103.000.000,00	1	106.090.000,00	1	109.272.700,00	1	112.550.881,00		
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				650.000.000,00		660.000.000,00		670.000.000,00		680.000.000,00		703.500.000,00		
Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	0	10	650.000.000,00	10	660.000.000,00	10	670.000.000,00	10	680.000.000,00	10	703.500.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				200.000.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00		230.000.000,00		240.000.000,00		
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.000.000,00	1	230.000.000,00	1	240.000.000,00		
1.03.12.2.04.0006 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		257.500.000,00		
Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	0	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	257.500.000,00		
1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		208.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	206.000.000,00		
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				8.475.564.385,00		8.647.075.672,70		8.822.077.186,15		9.000.640.529,88		9.182.838.794,47		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				822.792.000,00		839.247.840,00		856.032.796,80		873.153.452,74		890.616.521,79		
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	822.792.000,00	100	839.247.840,00	100	856.032.796,80	100	873.153.452,74	100	890.616.521,79	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				389.014.200,00		349.184.626,00		419.660.165,00		370.449.970,00		381.563.469,00		
Persentase data penerima rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	0	1	389.014.200,00	0	349.184.626,00	1	419.660.165,00	0	370.449.970,00	0	381.563.469,00		
	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1	1				1				1			
1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana				339.014.200,00		349.184.626,00		359.660.165,00		370.449.970,00		381.563.469,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1	1	339.014.200,00	1	349.184.626,00	1	359.660.165,00	1	370.449.970,00	1	381.563.469,00		
1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				50.000.000,00		0,00		60.000.000,00		0,00		0,00		
Tersusun dan Terverifikasi Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	0	0,00	1	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				433.777.800,00		490.063.214,00		436.372.631,80		502.703.482,74		509.053.052,79		
Meningkatnya pembangunan/rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	50	50	433.777.800,00	50	490.063.214,00	50	436.372.631,80	50	502.703.482,74	50	509.053.052,79		
	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	5		5		5		5		5			
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				233.777.800,00		230.491.134,00		237.405.868,00		244.528.044,00		251.863.885,00		
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	50	50	233.777.800,00	50	230.491.134,00	50	237.405.868,00	50	244.528.044,00	50	251.863.885,00		
1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				200.000.000,00		259.572.080,00		198.966.763,80		258.175.438,74		257.189.167,79		
Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	5	200.000.000,00	5	259.572.080,00	5	198.966.763,80	5	258.175.438,74	5	257.189.167,79		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				6.352.772.385,00		6.479.827.832,70		6.609.424.389,35		6.741.612.877,14		6.876.445.134,68		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	100	100	6.352.772.385,00	100	6.479.827.832,70	100	6.609.424.389,35	100	6.741.612.877,14	100	6.876.445.134,68	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				0,00		151.000.000,00		0,00		0,00		155.530.000,00		
Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	0	0	0,00	1	151.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	155.530.000,00		
1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				0,00		151.000.000,00		0,00		0,00		155.530.000,00		
Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	0	0	0,00	1	151.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	155.530.000,00		
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				6.352.772.385,00		6.328.827.832,70		6.609.424.389,35		6.741.612.877,14		6.720.915.134,68		
Persentase Kawasan Permukiman Kumuhdibawah 10 Ha yang ditangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	0	0	6.352.772.385,00	0	6.328.827.832,70	0	6.609.424.389,35	0	6.741.612.877,14	0	6.720.915.134,68		
	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	0	0		0		1		1		1			
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				6.352.772.385,00		6.328.827.832,70		6.559.424.389,35		6.691.612.877,14		6.669.415.134,68		
Tertaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	0	0	6.352.772.385,00	0	6.328.827.832,70	0	6.559.424.389,35	0	6.691.612.877,14	0	6.669.415.134,68		
1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh				0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00		
Tertaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	51.500.000,00		
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				200.000.000,00		206.000.000,00		212.180.000,00		218.545.400,00		225.101.762,00		
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	75	85	200.000.000,00	90	206.000.000,00	95	212.180.000,00	98	218.545.400,00	100	225.101.762,00	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		206.000.000,00		212.180.000,00		218.545.400,00		225.101.762,00		
Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	0	13	200.000.000,00	13	206.000.000,00	13	212.180.000,00	13	218.545.400,00	13	225.101.762,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				200.000.000,00		206.000.000,00		212.180.000,00		218.545.400,00		225.101.762,00		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	0	13	200.000.000,00	13	206.000.000,00	13	212.180.000,00	13	218.545.400,00	13	225.101.762,00		
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				1.100.000.000,00		1.122.000.000,00		1.144.440.000,00		1.167.328.800,00		1.190.675.376,00		
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	100	100	1.100.000.000,00	100	1.122.000.000,00	100	1.144.440.000,00	100	1.167.328.800,00	100	1.190.675.376,00	1.03.1.04.2.10.01.00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				1.100.000.000,00		1.122.000.000,00		1.144.440.000,00		1.167.328.800,00		1.190.675.376,00		
Persentase penyelenggaraan PSU permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	0	2	1.100.000.000,00	2	1.122.000.000,00	2	1.144.440.000,00	2	1.167.328.800,00	2	1.190.675.376,00		
	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	0	2		0		2		2		2			
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	0	0		2		0		0		0			
1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				500.000.000,00		522.000.000,00		526.440.000,00		530.788.800,00		535.039.176,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	0	2	500.000.000,00	2	522.000.000,00	2	526.440.000,00	2	530.788.800,00	2	535.039.176,00		
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				600.000.000,00		0,00		618.000.000,00		636.540.000,00		655.636.200,00		
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	0	2	600.000.000,00	0	0,00	2	618.000.000,00	2	636.540.000,00	2	655.636.200,00		
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				0,00		600.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersediannya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	0	0	0,00	2	600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				8.000.000.000,00		8.240.000.000,00		8.487.200.000,00		8.741.816.000,00		9.004.070.480,00		
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				8.000.000.000,00		8.240.000.000,00		8.487.200.000,00		8.741.816.000,00		9.004.070.480,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100	100	8.000.000.000,00	100	8.240.000.000,00	100	8.487.200.000,00	100	8.741.816.000,00	100	9.004.070.480,00	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				8.000.000.000,00		8.240.000.000,00		8.487.200.000,00		8.741.816.000,00		9.004.070.480,00		
Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	8.000.000.000,00	2	8.240.000.000,00	2	8.487.200.000,00	2	8.741.816.000,00	2	9.004.070.480,00		
2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				8.000.000.000,00		8.240.000.000,00		8.487.200.000,00		8.741.816.000,00		9.004.070.480,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	8.000.000.000,00	2	8.240.000.000,00	2	8.487.200.000,00	2	8.741.816.000,00	2	9.004.070.480,00		

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
1.	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai 1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing 1.03.02.2.01.0115 - Pembangunan Tanggul Sungai 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
2.	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
3.	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
4.	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
5.	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
6.	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan 1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan 1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan 1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan 1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat									
2.	Indeks Infrastruktur	Angka	67,75	70,18	72,6	74,892	77,424	79,996	81,696	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
2.	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	positif	%	0	64,50	71,29	78,79	87,08	96,24	100	
3.	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	positif	%	45,50	49,72	51,20	52,72	54,29	55,91	57,71	
4.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	positif	%	4	4,42	5,46	6,75	8,33	10,29	12,25	
5.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		%	0	71	73,42	75,48	77,21	78,33	79,45	
7.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	positif	%	97,80	97,80	98,09	98,39	98,78	99,28	99,88	
8.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
9.	Persentase Rumah Layak Huni	positif	%	77,39	77,39	77,64	77,89	78,14	78,39	82,00	
10.	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	positif	%	53,52	92,17	98,17	100	100	100	100	
11.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman		(%)	70,00	78,44	82,23	86,19	90,05	94,71	99,07	
12.	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
13.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	